



## Problematika Implementasi Koperasi Merah Putih dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Yopi Ardiansyah<sup>1</sup>, Natalia<sup>2</sup>, Marta Arya<sup>3\*</sup>

<sup>1-3</sup>Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [Martaarya2308@gmail.com](mailto:Martaarya2308@gmail.com)

**Abstract.** *The Merah Putih Cooperative is one of the government's programs that plays an important role in strengthening the village community's economy through community-based economic empowerment. However, in order to support this goal, various obstacles are still found that affect its implementation in achieving the welfare of village communities. This study aims to analyze the implementation of the Merah Putih Cooperative and identify the factors that hinder its execution. The study uses a qualitative method with a descriptive approach through library research. Data is obtained from various sources such as books, scientific journals, articles, policy documents, and relevant legislation. The research analysis uses George C. Edwards III's policy implementation theory, which includes aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, as well as Max Weber's social welfare theory. The research results indicate that the implementation of the Merah Putih Cooperative has not yet run optimally. The obstacles found include a lack of program socialization, limited human resources and business capital, low commitment of cooperative managers, weak coordination between institutions, as well as low community participation and trust in the cooperative. These conditions cause the cooperative to be unable to carry out its economic empowerment functions to the fullest. Therefore, it is necessary to strengthen institutional capacity, enhance human resource capacity, provide capital support, and develop community participation to improve the effectiveness of the Merah Putih Cooperative in supporting the welfare of village communities.*

**Keywords:** *Community Welfare; Policy Implementation; Red and White Cooperative; Village Cooperative; Village Economic Empowerment.*

**Abstrak.** Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas program dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Koperasi Merah Putih serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta teori kesejahteraan sosial Max Weber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Koperasi Merah Putih belum berjalan secara optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi kurangnya sosialisasi program, keterbatasan sumber daya manusia dan modal usaha, rendahnya komitmen pengelola koperasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Kondisi tersebut menyebabkan koperasi belum mampu menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan permodalan, serta pembangunan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas Koperasi Merah Putih dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan; Kesejahteraan Masyarakat; Koperasi Desa; Koperasi Merah Putih; Pemberdayaan Ekonomi Desa.

### 1. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa menjadi salah satu agenda yang strategis dalam pembangunan nasional di Indonesia. Desa tidak hanya bisa dipandang sebelah mata sebagai wilayah administratif, akan tetapi desa menjadi basis utama dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. sebagian besar penduduk Indonesia masyarakat Indonesia masih menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor pedesaan seperti pertanian, perkebunan, perdagangan

kecil, dan usaha mikro. Oleh sebab itu, pembangunan desa menjadi faktor penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Diah, 2020). Namun, masyarakat desa masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi yang kompleks, seperti akses permodalan usaha masih terbatas, lapangan pekerjaan belum berkembang secara optimal, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi desa. Kondisi ini mengakibatkan pembangunan desa berjalan lambat dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata (Siahaan et al., 2020).

Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah pusat terus mendorong berbagai kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, salah satu instrumen yang dianggap relevan adalah penguatan koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis masyarakat. Koperasi dipandang memiliki peran yang strategis dalam membangun ekonomi masyarakat secara gotong royong dan partisipasi masyarakat desa (Hendar & Si, 2011) karena sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, pemikiran mengenai pentingnya koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional juga dikemukakan oleh Mohammad Hatta sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional, menurut Hatta, koperasi menjadi solusi yang tepat untuk membangun ekonomi rakyat yang adil dan berkelanjutan (Hasan, 2023). Ia menganggap koperasi sebagai tiang utama dalam struktur ekonomi Indonesia yang berakar pada nilai kekeluargaan dan gotong royong, dalam pandangan Hatta, koperasi bukan hanya sebagai badan usaha, melainkan juga alat pendidikan watak dan karakter bangsa untuk mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pembangunan ekonomi.

Kebijakan saat ini yang menjadi perhatian dalam penguatan ekonomi masyarakat desa adalah pembentukan Koperasi Merah Putih. Program ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis komunitas dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi persoalan ekonomi. Secara aturan, program Koperasi Merah Putih memiliki tujuan yang cukup strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa (Aprilis & Zulkarnain, 2025). Melalui koperasi, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses terhadap pembiayaan usaha, penguatan pemasaran, pelatihan ekonomi produktif dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal desa. Akan tetapi, dalam implementasi program Koperasi Merah Putih masih menghadapi berbagai permasalahan yang serius. Banyak koperasi yang mengalami stagnasi kelembagaan, tidak aktif menjalankan kegiatan usaha dan bahkan hanya berfungsi sebagai formalitas administratif (Junaidi et al., 2025).

Permasalahan implementasi koperasi juga dapat dilihat dari lemahnya aspek komunikasi dengan sejauh mana informasi mengenai tujuan dan mekanisme program dipahami oleh masyarakat maupun pelaksanaan kebijakan, banyak program koperasi yang tidak tersosialisasi dengan baik sehingga masyarakat kurang memahami fungsi dan manfaat koperasi. Problematika implementasi Koperasi Merah Putih berpotensi menimbulkan ketidak efektif program dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat desa. Apabila koperasi hanya dibentuk sebagai formalitas program pemerintah tanpa penguatan kelembagaan yang nyata, maka keberadaan koperasi tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, bahkan kondisi ini dapat menimbulkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi (Wibowo, 2025).

Kondisi tersebut memperbesar risiko bahwa pembentukan koperasi menjadi sekadar pemenuhan formalitas program pemerintah, tanpa disertai penguatan kelembagaan yang nyata seperti kapasitas manajerial, tata kelola yang transparan, dan mekanisme akuntabilitas yang dapat dipercaya oleh anggota. Jika Koperasi Merah Putih hanya berdiri di atas kertas dan tidak dibekali pembinaan, pelatihan, serta dukungan teknis berkelanjutan, maka ekspektasi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sulit terwujud. Dampak jangka panjangnya bukan hanya program yang tidak efektif dalam mencapai tujuan kesejahteraan, tetapi juga munculnya sikap skeptis dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Untuk mencegah hal ini, diperlukan strategi komunikasi yang partisipatif dan penguatan kelembagaan yang konkret sehingga koperasi mampu berfungsi sebagai motor pembangunan ekonomi lokal, bukan sekadar simbol administratif (Mufid & Ardianti, 2025).

Implementasi Koperasi Merah Putih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa masih menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang kompleks. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, melainkan juga menyangkut dalam tata kelola kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, efektivitas kebijakan publik dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai problematika implementasi Koperasi Merah Putih menjadi penting untuk dilakukan guna memahami sejauh mana program ini mampu mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat desa serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Meskipun Koperasi Merah Putih dimaksudkan untuk mendorong ekonomi desa, ada banyak masalah saat menerapkannya di lapangan. Pertama, banyak koperasi mengalami stagnasi kelembagaan, yang berarti bahwa organisasi telah terbentuk secara administratif tetapi tidak menjalankan aktivitas ekonomi secara efektif. Banyak masyarakat desa belum memahami

manfaat koperasi, sehingga mereka kurang terlibat dalam kegiatan koperasi, pengambilan keputusan, dan pengembangan usaha. Pengalaman masa lalu yang buruk dengan kegagalan koperasi juga menyebabkan partisipasi masyarakat desa menjadi rendah.

Koperasi Merah Putih menjadi salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan usaha berbasis masyarakat, peningkatan akses permodalan, dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi. Secara berkelanjutan, program ini diharapkan dapat menjadi alat penting untuk mengurangi disparitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, banyak masalah masih terjadi saat melaksanakannya. Ini termasuk kelembagaan koperasi yang lemah, kekurangan sumber daya manusia, partisipasi masyarakat yang rendah, dan koordinasi antaraktor pelaksana kebijakan yang buruk. Koperasi Merah Putih dapat mengalami stagnasi kelembagaan dan gagal menjalankan fungsinya sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat jika berbagai hambatan tersebut tidak diidentifikasi, dianalisis, dan ditangani secara menyeluruh. Kondisi seperti ini tidak hanya menghambat pencapaian tujuan program, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif Koperasi Merah Putih beroperasi, menemukan hal-hal yang memengaruhi keberhasilannya, dan membuat saran kebijakan yang dapat meningkatkan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara inklusif dan berkelanjutan (Arief & Haeruddin, 2025).

Penelitian ini berangkat dari rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi program Koperasi Merah Putih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa serta apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Koperasi Merah Putih sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Koperasi Merah Putih dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Analisis implementasi tersebut dilihat melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program Koperasi Merah Putih sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas program koperasi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai implementasi program Koperasi Merah Putih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa serta berbagai problematika yang muncul dalam pelaksanaannya. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis fakta, kondisi, dan fenomena yang berkaitan dengan implementasi koperasi di masyarakat desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh melalui berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik koperasi, implementasi kebijakan publik, dan kesejahteraan masyarakat desa. Penggunaan studi pustaka dilakukan untuk memperoleh pemahaman teoritis dan empiris mengenai implementasi program Koperasi Merah Putih (Sugiyono, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dan teori kesejahteraan sosial Max Weber sebagai landasan analisis penelitian. Selain itu, peneliti juga menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan koperasi desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk memperkuat analisis penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi Koperasi Merah Putih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

## **3. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Implementasi Kebijakan**

Penelitian ini menggunakan teori Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III. Teori ini merupakan salah satu teori yang sangat relevan digunakan untuk menganalisis keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, termasuk dalam penelitian mengenai implementasi Koperasi Merah Putih. Edwards III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan itu sendiri, tetapi juga

oleh proses pelaksanaannya di lapangan. Menurutnya, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Reform & Rahmani, 2020).

Pertama, komunikasi berkaitan dengan sejauh mana kebijakan disampaikan secara jelas, konsisten, dan dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat sasaran. Dalam konteks Koperasi Merah Putih, komunikasi yang baik sangat penting agar masyarakat desa memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme program. Kedua, sumber daya mencakup ketersediaan tenaga pelaksana, dana, sarana prasarana, serta informasi yang memadai untuk mendukung jalannya kebijakan. Jika sumber daya yang dimiliki koperasi masih terbatas, maka implementasi program akan sulit berjalan optimal. Ketiga, disposisi mengacu pada sikap, komitmen, dan dukungan para pelaksana kebijakan terhadap program yang dijalankan. Apabila pengurus koperasi dan aparat terkait memiliki kemauan yang kuat untuk melaksanakan program secara sungguh-sungguh, maka peluang keberhasilan kebijakan akan semakin besar. Sebaliknya, jika terdapat sikap pasif atau kurangnya komitmen, maka program cenderung hanya berjalan secara formalitas. Keempat, struktur birokrasi berhubungan dengan pola kerja, pembagian tugas, prosedur, serta koordinasi antar pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu rumit atau tidak efektif dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan Koperasi Merah Putih di tingkat desa.

Dengan demikian, teori George C. Edwards III sangat tepat digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi implementasi Koperasi Merah Putih secara menyeluruh. Teori ini membantu peneliti untuk melihat apakah program tersebut telah dijalankan sesuai tujuan atau justru menghadapi hambatan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### **Teori Kesejahteraan Sosial Max Weber**

Teori kesejahteraan sosial Max Weber menjadi relevan digunakan dalam penelitian ini karena dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara tindakan sosial, interaksi antarpelaku, dan perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Weber menjelaskan bahwa tindakan individu tidak dapat dipisahkan dari makna subjektif yang melatarbelakanginya, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat desa, termasuk dalam koperasi, perlu dipahami sebagai hasil dari tindakan sosial yang dipengaruhi oleh nilai, tujuan, dan hubungan antaranggota masyarakat (Weber, 2019). Dalam konteks Koperasi Merah Putih, teori ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat, kepercayaan antaranggota, serta orientasi mereka terhadap kegiatan ekonomi bersama mampu mendukung terciptanya kesejahteraan (Rudyanto et al., 2025).

Dalam perspektif Weber, kesejahteraan tidak hanya dipahami sebagai meningkatnya pendapatan atau terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga sebagai hasil dari terbentuknya hubungan sosial yang harmonis, rasionalitas dalam bertindak, serta adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam aktivitas kolektif. Koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis kebersamaan pada dasarnya menuntut adanya kesadaran sosial, solidaritas, dan partisipasi masyarakat agar tujuan bersama dapat tercapai. Oleh karena itu, keberadaan Koperasi Merah Putih dapat dianalisis melalui bagaimana masyarakat menanggapi, mendukung, dan memanfaatkan koperasi sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Teori Weber juga membantu peneliti memahami bahwa keberhasilan koperasi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh tindakan sosial yang rasional dan terarah. Apabila masyarakat memandang koperasi sebagai wadah yang bermanfaat untuk meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan usaha, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal, maka koperasi berpeluang besar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan. Sebaliknya, jika masyarakat tidak memiliki kepercayaan, partisipasi rendah, atau hanya menganggap koperasi sebagai formalitas kelembagaan, maka fungsi koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi akan menjadi kurang optimal.

Dengan demikian, teori Max Weber dapat dijadikan landasan untuk menganalisis dimensi sosial dari kesejahteraan masyarakat desa dalam implementasi Koperasi Merah Putih. Teori ini tidak hanya menyoroti aspek ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya hubungan sosial, partisipasi, dan makna tindakan masyarakat dalam membentuk keberhasilan program koperasi.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, implementasi program Koperasi Merah Putih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa menunjukkan bahwa secara konseptual program ini memiliki tujuan yang strategis, khususnya dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas dan meningkatkan kemandirian masyarakat desa. Namun demikian, dalam praktiknya implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya, maupun sosial masyarakat. Analisis ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III serta teori kesejahteraan sosial dari Max Weber untuk memahami dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut (Aprilis & Zulkarnain, 2025).

## **Bagaimana implementasi program Koperasi Merah Putih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa?**

Jika dilihat dari konteks komunikasi, implementasi Koperasi Merah Putih masih belum berjalan secara optimal. Proses penyampaian informasi terkait kebijakan belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan, sehingga banyak masyarakat desa yang belum memahami secara komprehensif mengenai tujuan, manfaat, serta mekanisme operasional koperasi. Kurangnya sosialisasi yang sistematis menyebabkan terjadinya distorsi informasi di tingkat masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan pandangan George C. Edwards III yang menekankan bahwa kejelasan dan konsistensi komunikasi menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan cenderung tidak dipahami secara utuh oleh kelompok sasaran (Nugroho, 2014).

Dari sisi sumber daya, keterbatasan menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi koperasi. Koperasi di tingkat desa umumnya masih menghadapi keterbatasan modal usaha, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis juga menyebabkan pengelolaan koperasi yang tidak berjalan secara profesional. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing koperasi dalam upaya mengembangkan usaha ekonomi masyarakat. Temuan ini didukung oleh penelitian (Junaidi et al., (2025). yang menyatakan bahwa kelemahan utama koperasi desa terletak pada keterbatasan kapasitas manajerial dan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Selanjutnya, dalam konteks disposisi, ditemukan bahwa komitmen dan sikap pelaksana kebijakan masih belum menunjukkan keseriusan yang optimal. Beberapa pengurus koperasi cenderung pasif dan kurang memiliki inisiatif dalam mengembangkan kegiatan usaha koperasi. Rendahnya motivasi inilah yang menyebabkan koperasi tidak mampu menjalankan fungsi ekonominya secara maksimal dan hanya berfungsi sebagai formalitas administratif. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, disposisi yang lemah akan berdampak langsung pada rendahnya kualitas pelaksanaan kebijakan di lapangan (Rahmani, 2020).

Pada konteks struktur birokrasi, implementasi program juga menghadapi kendala yang berupa kurang efektifnya koordinasi antar lembaga yang terlibat. Struktur birokrasi yang cenderung kompleks, prosedur yang berbelit, serta pembagian tugas yang kurang jelas menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan program di tingkat desa. Kondisi ini berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan serta lemahnya sistem pengawasan terhadap kinerja koperasi. (Aprilis & Zulkarnai, 2025). Juga menegaskan bahwa lemahnya tata

kelola kelembagaan menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan program koperasi desa.

### **Koperasi dan Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan teori Max Weber, kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh tindakan sosial, nilai, kepercayaan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu aktivitas kolektif. Weber menekankan bahwa setiap tindakan individu memiliki makna subjektif yang memengaruhi cara mereka bertindak dalam kehidupan sosial, yang termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks Koperasi Merah Putih, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada aspek material seperti modal dan fasilitas, akan tetapi juga pada sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran, kepercayaan, dan kemauan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan koperasi tersebut (Putnam et al., 1994).

Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam koperasi masih terbilang cukup rendah. Banyak masyarakat desa yang belum sepenuhnya melihat koperasi sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, yang sering kali dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu terkait koperasi yang tidak berjalan dengan baik atau bahkan mengalami kegagalan. Dalam perspektif Weber, rendahnya kepercayaan ini menunjukkan lemahnya legitimasi sosial koperasi di mata masyarakat, sehingga berdampak pada minimnya keterlibatan dalam aktivitas kolektif.

Selain itu, dari sudut pandang tindakan sosial, masyarakat cenderung belum memiliki orientasi rasional terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi kolektif. Weber membagi tindakan sosial menjadi beberapa tipe, salah satunya adalah tindakan rasional instrumental (*zweckrational*), yaitu tindakan yang didasarkan pada pertimbangan tujuan dan manfaat. Dalam konteks ini, masyarakat belum sepenuhnya memandang koperasi sebagai sarana strategis untuk mencapai tujuan ekonomi, seperti peningkatan pendapatan, akses permodalan, maupun pengembangan usaha. Akibatnya, koperasi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai wadah untuk memperkuat ekonomi lokal. Lebih lanjut, koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis kebersamaan pada dasarnya membutuhkan solidaritas sosial dan kesadaran kolektif yang tinggi. Namun, dalam praktiknya, hubungan sosial antar anggota koperasi masih belum terbangun secara kuat. Kurangnya interaksi yang intensif, lemahnya rasa memiliki terhadap koperasi, serta minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan menjadi indikator bahwa koperasi belum mampu menjadi ruang sosial yang inklusif dan partisipatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi sosial dalam koperasi masih belum berkembang secara optimal.

Dalam perspektif Max Weber, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tindakan sosial masyarakat desa masih belum sepenuhnya terarah pada upaya kolektif untuk mencapai kesejahteraan bersama. Tanpa adanya kepercayaan, partisipasi aktif, serta orientasi rasional terhadap koperasi, maka koperasi akan sulit berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif. Oleh karena itu, penguatan aspek sosial seperti peningkatan kesadaran masyarakat, pembangunan kepercayaan, serta pemberdayaan partisipasi menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam implementasi Koperasi Merah Putih.

### **Faktor Penghambat Implementasi Koperasi Merah Putih**

Implementasi Koperasi Merah Putih masih menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, hambatan implementasi dapat dianalisis melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Subekti et al., 2027). Menurut Edwards III, komunikasi yang tidak jelas dan tidak konsisten akan menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan karena kelompok sasaran tidak memahami arah kebijakan secara utuh (Nugroho, 2014). Hambatan tersebut dapat dibagi menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berasal dari dalam kelembagaan koperasi itu sendiri. Permasalahan yang paling menonjol adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi. Banyak pengurus koperasi belum memiliki kemampuan manajerial dan administrasi yang memadai sehingga pengelolaan koperasi belum berjalan secara optimal. Selain itu, keterbatasan modal usaha dan kurangnya inovasi dalam pengembangan usaha menyebabkan koperasi sulit berkembang (Siahaan et al., 2020). Rendahnya komitmen sebagian pengurus juga membuat koperasi hanya berjalan sebagai formalitas administratif tanpa kegiatan usaha yang aktif (Rahmani, 2020). Hambatan eksternal berasal dari faktor di luar koperasi. Kurangnya sosialisasi program menyebabkan masyarakat belum memahami fungsi dan manfaat Koperasi Merah Putih secara menyeluruh. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi (Aprilis & Zulkarnain, 2025). Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah dan pendamping program masih belum berjalan efektif. Prosedur birokrasi yang cukup panjang juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program di tingkat desa. Akibatnya, implementasi koperasi belum mampu berjalan secara maksimal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa (Junaidi et al., 2025).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Koperasi Merah Putih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa belum berjalan secara optimal. Program ini pada dasarnya memiliki tujuan yang baik dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha bersama. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala sehingga manfaat koperasi belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan Koperasi Merah Putih meliputi kurangnya sosialisasi program, keterbatasan sumber daya manusia dan modal usaha, lemahnya pengelolaan koperasi, serta rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang belum efektif juga mempengaruhi keberhasilan program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pengelolaan koperasi, dan keterlibatan masyarakat agar koperasi dapat berfungsi lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Koperasi Merah Putih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, terdapat beberapa rekomendasi penting yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan. Pertama, pemerintah desa dan instansi terkait perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan Koperasi Merah Putih. Sosialisasi yang terencana dan menyeluruh akan membantu masyarakat memahami peran koperasi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga menumbuhkan minat dan kepercayaan warga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Penguatan kapasitas sumber daya manusia bagi pengurus koperasi menjadi hal krusial agar pengelolaan koperasi berjalan profesional dan berkelanjutan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pelatihan manajemen koperasi, pengelolaan administrasi, serta pengembangan usaha yang relevan dengan potensi lokal. Pendampingan berkelanjutan oleh pihak berkompeten juga sangat dianjurkan untuk memastikan penerapan ilmu yang diperoleh serta membantu pengurus menghadapi tantangan operasional sehari-hari.

Pemerintah perlu menghadirkan dukungan yang lebih konkrit berupa akses permodalan, fasilitas usaha, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Akses permodalan yang mudah dan terjangkau akan memperkuat modal kerja koperasi, sementara fasilitas usaha (misalnya ruang usaha, alat produksi, atau infrastruktur pemasaran) dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing anggota. Pengawasan yang lebih efektif juga penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan dana sehingga keberlanjutan program koperasi dapat terjamin. Pengurus koperasi diharapkan membangun partisipasi aktif masyarakat melalui praktik tata kelola yang transparan, pembagian manfaat yang adil, dan

pelibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi dalam laporan keuangan dan kebijakan operasional akan meningkatkan kepercayaan anggota, sedangkan keterlibatan anggota dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan akan memperkuat rasa memiliki serta komitmen untuk mendukung keberlangsungan koperasi.

Diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah desa, dinas koperasi, dan masyarakat agar pelaksanaan Koperasi Merah Putih berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan desa. Koordinasi lintas lembaga ini penting untuk menyelaraskan program, mengoptimalkan sumber daya, serta menghindari duplikasi atau kebijakan yang saling bertentangan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan metode penelitian lapangan dengan melakukan wawancara mendalam kepada pengurus koperasi dan anggota masyarakat desa. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan data empiris yang lebih kaya dan kontekstual mengenai efektivitas implementasi Koperasi Merah Putih, tantangan yang dihadapi, serta praktik-praktik terbaik yang dapat direkomendasikan untuk replikasi di desa lain.

## DAFTAR REFERENSI

- Aprilis, A., & Zulkarnain, Z. (2025). Peluang dan tantangan implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dalam pembangunan ekonomi desa. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 9(5), 1221–1235.
- Arief, S., & Haeruddin, H. (2025). Strategi pengembangan Koperasi Desa Merah Putih: Tinjauan literatur atas praktik terbaik dan tantangan global. *Al-Buhuts*, 21(1), 284–299.
- Diah, M. P. (2020). *Pembangunan pedesaan untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota di Indonesia: Peluang dan tantangan*. <https://doi.org/10.33005/paj.v2i2.45>
- Hasan, A. (2023). Pemikiran ekonomi kerakyatan Muhammad Hatta dalam perspektif ekonomi Islam (Muhammad Hatta people's economic thinking in Islamic economic perspective). 9(03), 3586–3592. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9753>
- Hendar, S. E., & Si, M. (2011). *Manajemen perusahaan koperasi: Pokok-pokok fikiran mengenai manajemen dan kewirausahaan koperasi*. Erlangga.
- Junaidi, S. H., Sjah, T., & Budastra, K. (2025). Mungkinkah Koperasi Merah Putih berhasil. 4(November), 422–434. <https://doi.org/10.55681/economina.v4i11.1802>
- Mufid, M., & Ardianti, A. D. (2025). Pendampingan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih untuk penguatan usaha simpan pinjam di Desa Sranak. *Journal of Research Applications in Community Service*, 4(3), 101–108. <https://doi.org/10.32665/jarcoms.v4i3.5553>
- Nugroho, R. (2014). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Rahmani, M. R. (2020). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada badan publik sektor sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 8(2), 85–94. <https://doi.org/10.52239/jar.v8i2.5052>

- Rudyanto, G. T. U., Nugroho, W. B., & Tamim, I. H. (2025). Perspektif tindakan sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dinas Sosial Kota Denpasar. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10).
- Siahaan, A. M., Siahaan, R., & Siahaan, Y. E. (2020). Faktor pendukung dan penghambat kinerja UMKM dalam meningkatkan daya saing. *Jurnal Stindo Profesional*, 6(6), 143–156.
- Sugiyono, M. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif* (Ed. 3, Cet. 3). Alfabeta.
- Weber, M. (2019). *Economy and society: A new translation*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674240827>
- Wibowo, E. (2025). Implementasi kebijakan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih: Analisis kapasitas sumber daya manusia pengurus dalam perspektif Mazmanian dan Sabatier. *Jurnal Ekspos*, 3(2), 43–58.